

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Fitria Ananda Basalama¹, Irawaty Igrisa², Rustam Tuhopi³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Email: fitriabasalama28@gmail.com¹, irawatyigrisa17@ung.ac.id², rustam@ung.ac.id³

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dengan Sub Fokus penelitian yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Pendekatan penelitian ini Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mengamati dan menangkap secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Berdasarkan hasil Pada Proses Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dinilai perlu adanya peningkatan dari Implementor terhadap beberapa aspek yaitu, Komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur Birokrasi agar supaya Implementasi dari kebijakan ini tercapai sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Proses Implementasi ini di ukur dengan Aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi dan di nilai sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Keluarga Harapan*

Abstract

The aim of the research is to determine: Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Bongoime Village, Tilongkabila District, Bone Bolango Regency, with research sub-focuses namely: Communication, Resources, Disposition/Attitude of Implementers and Bureaucratic Structure. This research approach The type of research in this thesis is Qualitative Descriptive Research. Qualitative descriptive research is a type of research that observes and captures factually and actually the real world and examines the behavior of individuals, groups and their daily experiences, as well as studying, explaining or interpreting a case in its context naturally without any intervention from outside parties. Based on the results of the Family Hope Program Implementation Process in Bongoime Village, Tilongkabila District, Bone Bolango Regency, it was deemed necessary to improve the Implementor in several aspects, namely, Communication, resources, attitude of the implementer, and Bureaucratic structure so that the Implementation of this policy is achieved in accordance with the stated objectives. desired. This implementation process is measured by aspects of communication, resources, disposition/attitude of implementers and bureaucratic structure and is assessed as being in accordance with existing regulations.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program*

Article Info

Received date: 21 April 2024

Revised date: 27 April 2024

Accepted date: 2 May 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sering di jumpai di berbagai Negara tidak terkecuali Indonesia yang masih dalam kategori Negara berkembang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan maupun program untuk menuntaskan masalah kemiskinan tersebut, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dari segala aspek sampai kepada pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusianya. Kemiskinan telah ada sejak adanya manusia hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, di setiap lingkungan ataupun golongan masyarakat tidak sedikit masyarakat yang tergolong dalam kategori tidak mampu, sehingga kemiskinan adalah keadaan yang sudah tidak mengherankan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kateogori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif

dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.

Kemiskinan yang merupakan penghambat pembangunan ditandai dengan adanya keterbatasan, tidak memiliki kemampuan dan juga memiliki banyak kekurangan, keterbatasan misalnya dalam mendapatkan kebebasan hidup sesuai tingkat harapan hidup, ketidakmampuan dalam mendapatkan pendidikan, mendapat akses kesehatan yang memadai serta mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup umumnya disebabkan terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja yang dimiliki, kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta kurangnya perlindungan kerja yang layak.

Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan ini mengeluarkan kebijakan mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yakni Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan di keluarkan kebijakan tersebut maka pemerintah ingin masalah kemiskinan ini segera di tuntaskan oleh pemerintah di tiap daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda, masih tingginya kemiskinan di tiap daerah menjadi PR untuk pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Tidak terkecuali Provinsi Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang jumlah penduduk miskinnya ada pada jumlah 15.15% /Maret 2023, masih tingginya jumlah penduduk miskin tersebut di sebabkan oleh banyak faktor salah satunya Provinsi Gorontalo adalah daerah pemekaran dari daerah Sulawesi Utara, sehingga Provinsi Gorontalo masih dalam tahap perkembangan dalam segi perekonomian. Provinsi Gorontalo memiliki 6 kabupaten yang di antaranya, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Di enam kabupaten tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda.

Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya masih tinggi, di lihat dari jumlah di atas, kemiskinan menjadi masalah yang harus di atasi oleh pemerintah setiap tahunnya, kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal daerah maupun eksternal. Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 18 kecamatan, 11 Kelurahan, dan 158 desa. Pada tahun 2017, Luas wilayahnya mencapai 1.984,31 km² dan jumlah penduduk 160.154 jiwa dengan sebaran penduduk 81 jiwa/km². Dengan angka Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango pada Maret 2021 sebesar 16,30%, naik 0,49% poin terhadap terhadap Maret 2020. Dan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango pada Maret 2021 sebesar 25.760 jiwa, meningkat sebanyak lebih kurang 40 jiwa terhadap Maret 2020. Serta Garis kemiskinan Kabupaten Bone Bolango pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp449.543,-/kapita/bulan, yang berarti naik sebesar Rp25.268,-/kapita/bulan, atau naik sebesar 5,625. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango pada Maret 2021 naik menjadi 3,23. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango pada Maret 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 0,86. (Badan Pusat Statistic)

Pemerintah dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH) mulai diperkenalkan pada tahun 2007 dan di tujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pembedayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa : “ Perlindungan adalah semua upaya yang di arahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentangan sosial.

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan

penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Adapun sasaran atau penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari: Komponen kesehatan yaitu ibu hamil/nifas/menyusui. Komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah dari 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar yang menempuh tingkat SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat. Komponen kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, anak usia 0 sampai dengan 15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Dalam Peraturan Menteri Sosial, tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tepatnya pada pasal 1 yang berbunyi Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data Informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH, dan sesuai dengan peraturan Menteri sosial tentang Program Keluarga PKH pada pasal 5.

Desa Bongoime memiliki jumlah penduduk 2519 jiwa dengan jumlah laki-laki 1270 orang dan perempuan 1249 orang, dengan jumlah penduduk miskin yaitu 805 KK, masih tingginya angka kemiskinan di Desa Bongoime ini menjadi perhatian besar dari pemerintah daerah. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa tersebut di nilai dapat membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime berjumlah 153 KK dan yang belum menerima bantuan tersebut berjumlah 652 KK.

Dengan banyaknya keluarga miskin di Desa Bongoime maka Program PKH ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, akan tetapi berdasarkan hasil Observasi awal peneliti, sesuai dengan data di atas jumlah masyarakat miskin pada tahun 2023 meningkat drastis dengan jumlah keluarga miskin yaitu 805 KK dari tahun sebelumnya, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Desa Bongoime. Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta di lapangan seperti, pemberian bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, masyarakat yang seharusnya harus mendapatkan tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan bantuan tersebut hal ini dikarenakan, yang mendapatkan hanya orang yang memiliki hubungan dengan aparat yang ada di menjadi petugas pendataan.

Dalam mengukur Implementasi mengenai PKH yang ada di Desa Bongoime ini peneliti menggunakan Teori Edward III dengan beberapa aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Aspek Komunikasi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008 : 150) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui adanya kesadaran untuk menerima kebijakan apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat. Kemudian aspek Sumber Daya Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Selanjutnya aspek Disposisi/sikap pelaksanaan Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana). Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik

karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah Struktur Birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procedures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani.

Berdasarkan penjelasan Implementasi dari Program Keluarga Harapan yang ada di Bongoime diukur dengan menggunakan beberapa aspek di atas sehingga dapat dilihat bahwa Program tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan memberikan manfaatnya atau tidak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merasa perlu mengangkat judul penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi tempat atau lokasi penelitian yaitu Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Pendekatan Penelitian

Menurut Moleong (2016:6) menyebutkan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenar-benarnya dalam proses Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara beberapa masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Dengan melakukan pendekatan secara emosional terhadap informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala Desa Bongoime, Sekretaris Desa, Pendamping PKH

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelusuran terhadap beberapa bahan pustaka dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti misalnya, buku, majalah, jurnal, dan artikel terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang didapatkan pada lokasi penelitian yakni dokumentasi ataupun data yang sudah dibukukan di lokasi tersebut.

Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya kemudian juga berupa pembahasan yakni diskusi antara data temuan dengan teori-teori yang digunakan. Sugiyono (2018:244) mengemukakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara runtut data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dengan cara menyusun data berdasarkan jenisnya, menjabarkan kedalam unsur-

unsur, melakukan perpaduan, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Sementara itu Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018:246) mengemukakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun yang menjadi aktivitas dalam menganalisis data yaitu: mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL

Deskripsi Lokasi Penelitian

Bongoime adalah salah satu desa di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia. Untuk mengetahui mulai berdirinya dan terbentuknya Desa Bongoime secara ringkas kami uraikan sejarah desa. Terjadinya Kecamatan Tilongkabila berdasarkan buku sejarah 5000 tahun yang lampau seluruh dataran Gorontalo masih di genangi air yang merupakan lautan belaka yang kelihatan pada saat itu hanyalah 2 buah gunung yakni Tilongkabila dan Boliyohuto yang seolah-olah 2 buah pulau yang pada saat itu kedua gunung tersebut telah di diami manusia.

Pada waktu itu Pombolohudu anak dari Puluwidani pada tahun 1272 membongkar batu bata yang menepang pelabuhan Gorontalo sekarang ini, maka air yang tergenang merupakan lautan dan berangsur-angsur surut. Desa Bongoime di bentuk sejak bulan April 2005 yang terdiri dari 4 dusun yaitu, Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4.

Batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poowo - Poowo Barat Kecamatan Kabila, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunggulo Selatan-Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toto Utara- Berlian – Mootilango Kecamatan Tilongkabila.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah dalam upaya untuk menangani masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social mengeluarkan kebijakan yaitu PKH, Program Keluarga Harapan yang di peruntukan untuk masyarakat yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Bongoime Program Ini sangat di manfaatkan oleh sebagian warga masyarakat yang tidak mampu. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Perlindungan Sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah 18 ditetapkan.

Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program Pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Di awal pelaksanaan program ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. (Wati, 2020)

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium. Ada lima komponen MGDs (Millennium Development Goals) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH,

meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH. (S, 2019)

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan Publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui adanya kesadaran untuk menerima kebijakan apa yang akan di kerjakan. Komunikasi yang ada di Desa Bongoime terhadap Implementasi dari Program keluarga Harapan ini terbangun dengan baik, hal ini bisa dilihat dari beberapa keluhan dari KPM PKH yang ada di Desa ini di tangani atau di berikan solusi yang sesuai oleh Pendamping dan di bantu oleh Pemerintah Desa.

Komunikasi yang terbangun dikarenakan diadakannya pertemuan dari pihak Pendamping dengan KPM PKH yang di laksanakan 1 bulan 1 kali berkelompok di rumah salah satu dari anggota kelompok tersebut, dalam pertemuan itu baik masalah atau keluhan dari KPM PKH ini di sampaikan kepada Pendamping. Namun ada beberapa kekurangan yaitu pendamping di tiap Desa hanya berjumlah 1 orang sehingga ada beberapa informasi yang sampai tapi molor waktu karena harus menunggu jadwal pertemuan terlebih dahulu karena jumlah kelompok yang cukup banyak.

Hal ini sejalan dengan informasi yang di sampaikan oleh Pendamping PKH desa Bongoime bahwa Dalam proses menjalin komunikasi yang baik sebagai Pendamping PKH desa selalu memberikan informasi yang jelas kepada KPM PKH. Komunikasi ini sangat perlu terjalin antara Pemerintah Desa, Koordinator Kecamatan, Pendamping PKH desa dan juga KPM PKH, segala bentuk informasi mengenai kebijakan ini di sampaikan secara terbuka dan langsung kepada KPM. (E.R 29 Des 2023)

Lebih lanjut di sampaikan oleh Sekretaris Desa Bongoime mengenai Faktor Komunikasi yaitu Komunikasi mengenai PKH ini selalu di sampaikan oleh Pendamping PKH desa di setiap pertemuan dengan KPM PKH yang di laksanakan sebulan sekali, ini sangat perlu untuk kelancaran program PKH ini, setelah diadakannya pertemuan tersebut, pendamping PKH Desa mengkoordinasikan segala hal yang bersangkutan kepada pihak Desa. (A.M 20 Des 2023)

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Koordinator Kecamatan Tilongkabila mengenai Komunikasi yaitu : Untuk Komunikasi yang terjalin antara Pendamping PKH desa, aparat desa dan Koordinator wilayah terjalin dengan bagus ini di karenakan, komunikasi yang di lakukan berjenjang di mulai dari Pendamping PKH desa atau pendamping tingkat desa, lalu Koordinator kecamatan kemudian ke tingkat Koordinator tingkat kabupaten dan Koordinator wilayah Provinsi lalu ke tingkat Koordinator regional dan Koordinator nasional yang berkoordinasi dengan kementerian. (R.H 29 Des 2023)

Lebih lanjut di sampaikan oleh Koordinator mengenai bentuk komunikasi yang di lakukan ialah : Dalam Proses komunikasi yang di lakukan, Pendamping PKH desa mengadakan pertemuan Kelompok P2K2 (Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga) dalam pertemuan ini di sampaikan beberapa materi mengenai, pengetahuan pendidikan anak, kesehatan anak (stunting dan gizi). Di samping itu dalam pertemuan ini di lakukan evaluasi mengenai penggunaan dana pkh yang di terima oleh masing-masing KPM. Pertemuan ini di adakan setiap bulan di lokasi yang berbeda, misalnya di bulan pertama di salah satu rumah KPM PKH selanjutnya di bulan selanjutnya di lokasi yang telah di sepakati. (R.H 29 Des 2023)

Pernyataan di atas Sejalan dengan yang di sampaikan oleh Pendamping PKH desa Bongoime mengenai bentuk Komunikasi yaitu :

Komunikasi yang terjalin yang di laksanakan dari Desa di lakukan tiap bulan dan berkelompok, di Desa Bongoime Kelompok KPM PKH di bagi menjadi 7 kelompok, dalam pertemuan kelompok itu komunikasi yang terjalin berisi mengenai siapa aja yang masih berhak dan layak untuk di usulkan kembali mendapatkan saluran bantuan PKH ini, lalu di usulkan lewat Aplikasi Six and G (6G), dalam pertemuan ini seluruh keluhan di mulai dari PKH tersebut yang sudah tidak masuk lagi atau keterlambatan dan masuk, namun terkait dengan dana yang belum masuk nanti akan di laporkan ketika dana tersebut sudah 6 bulan tidak masuk, ketika hal tersebut terjadi Pendamping PKH mengusulkan kembali. (E.R 29 Des 2023)

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat KPM-PKH Desa Bongoime bahwa :

Kita di desa ini, KPM PKH terbagi beberapa kelompok, dan di adakan pertemuan sebulan sekali di setiap kelompoknya, untuk memberitahukan kepada pendamping dan Pendamping PKH beberapa keluhan dan saran. (N.M 11 Jan 2024)

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti Komunikasi yang terjalin dalam Implementasi PKH di Desa Bongoime berjalan dengan lancar bisa dilihat dari setiap pertemuan yang di adakan, masyarakat dan pendamping memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi Implementasi Kebijakan PKH berupa koordinasi antara pihak Pendamping PKH dan KPM PKH. Program PKH ini dapat di katakan berhasil dengan baik ketika Komunikasi yang di jalankan tepat sasaran dan tidak ada hambatan yang akan mengakibatkan Program ini tidak terlaksanakan dengan maksimal. Dalam mewujudkan Implementasi dari Kebijakan Program Keluarga Harapan para Implementor di tuntut untuk tau dan paham apa yang harus mereka lakukan, segala perintah di sampaikan dengan jelas dan mudah di pahami oleh masyarakat. Dari hasil pengamatan peneliti dapat di tegaskan bahwa Komunikasi mengenai Program keluarga Harapan di Desa Bongoime berjalan dengan baik yang mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang sejalan dengan kebijakan yang telah di tetapkan secara politik. Sumber Daya ada di Desa Bongoime sebagai penunjang terjalannya atau berhasilnya Program Keluarga Harapan ini yaitu Sumber Daya Manusinya yaitu Pendamping PKH dan Pemerintah Desa yang memberikan Kontribusi atau melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing serta bantuan dari Masyarakat seperti tempat perkumpulan tiap kelompok dan bantuan Sumber Daya dari Pemerintah Desa yakni aplikasi yang di gunakan sebagai alat bantu untuk percepatan pengusulan nama-nama yang akan menjadi penerima bantuan. Beberapa Sumber Daya di atas baik secara finansial, material serta sarana dan prasarana, dapat mendukung dan mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Bongoime.

Hal ini sejalan dengan Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Bongoime, bahwa :

Terkait dengan Sumber daya yang di gunakan dalam Program Pkh, tentunya hal tersebut sangat berperan dalam keberhasilan program ini,. Sebagai Pendamping PKH desa, seluruh keluhan atau saran dari KPM PKH di sampaikan atau di usulkan kepada pemerintah desa dan Koordinator wilayah untuk di tindak lanjuti. (E.R 29 Des 2023)

Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa Bongoime bahwa :

Setiap bulan di adakan pertemuan dengan Kelompok KPM PKH dan di laporkan oleh Pendamping PKH apa saja hasil dari pertemuan tersebut kemudian di tindak lanjut oleh pemerintah desa sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan agar program dari kebijakan ini berjalan dengan baik. (S.P 29 Des 2023)

Sejalan dengan pernyataan tersebut apa yang di sampaikan oleh Pendamping PKH desa Bongoime mengenai sumber daya yaitu :

Fasilitas yang di berikan oleh pemerintah desa yaitu kantor yang bisa di gunakan sebagai tempat pertemuan, dan bentuk pengawasan yang di lakukan oleh aparat desa yang menerima saran atau masukan yang akan di usulkan ketingkat pusat. (E.R 29 Des 2023)

Pernyataan lain di katakan oleh Koordiantor Kecamatan terkait sumber daya, yaitu :

Dana yang di salurkan dari program ini berbeda-beda tiap KPM, dana yang mereka dapatkan sesuai dengan tanggungan yang KPM itu miliki. Di mulai dari KPM yang memiliki Anak sekolah dasar sebesar Rp. 225.000.00/3bulan, SMP Rp. 375.000.00/3bulan, SMA Rp.500.000.00/3 bulan. Yang lansia dan disabilitas Rp.600.000.00/3 bulan. Kemudian yang kategori ibu hamil mempunyai Anak bayi dan balita yang dana yang di terima Rp.700.000.00/3bulan. Namun sudah 2 tahun terakhir aturan baru yang berlaku, anak yang termasuk pada daftar penerima bantuan hanya sampai anak kedua. (R.H 29 Des 2023)

Sejalan dengan pernyataan di atas, informasi yang di sampaikan oleh KPM PKH terkait sumber daya yaitu :

Untuk sumber daya yang ada untuk PKH ini lebih kepada SDA dan pengawasan yang di berikan oleh petugas dan Aparat Desa. (N.M 10 Jan 2024)

Informan lain mengatakan bahwa :

Sumber daya penunjang lainnya datang dari bantuan masyarakat yang menjadi penerima bantuan, bantuan yang mereka beri ialah tempat untuk pertemuan setiap kelompok yang di laksanakan setiap bulannya” (R. H 29 Des 2023)

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti Sumber Daya yang ada di Desa Bongoime sebagai penunjang terjalannya Program Ini sudah sangat membantu baik dari SDM dan Sumber daya seperti Sarana dan Prasarana yang ada. Sumber daya yang di gunakan menunjukan bahwa sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan ini ialah pendamping PKH ditingkat Desa dan Kecamatan dan aparat Desa serta masyarakat yang terdaftar sebagai KPM PKH. Sumber daya lain yaitu sarana dan prasarana yang mendukung serta dana yang di salurkan.

Disposisi/Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Disposisi merupakan salah satu penentu keberhasilan, Sikap pelaksana ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dari kebijakan suatu program khususnya mengenai Program Keluarga Harapan. Jika dalam pelaksanaan Implementasi berjalan secara efektif maka harus memilih sikap pelaksana yang baik. Sikap pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilonkabila Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik dilihat dari cara mereka menyikapi atau memberikan pengertian kepada KPM PKH ketika terjadi masalah seperti bantuan yang lambat masuk, pengusulan nama yang seharusnya mendapatkan bantuan mereka menanggapi dengan cepat dan memberikan solusi yang bisa dan di terima baik oleh masyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan ini sikap dari para pelaksana yang ada di Desa Bongoime dinilai sudah baik karena selalu berkoordinasi baik dengan pihak daerah sampai di pihak pusat, dengan masyarakat dan pemerintah Desa yang.

Menyikapi sikap pelaksana dalam program ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informasi bahwa :

Komitmen yang di jalankan antara pemerintah desa dengan Pendamping PKH desa maupun koordinator wilayah dalam menjalankan kebijakan program ini dengan cara selalu berkoordinasi antara pemerintah desa maupun kecamatan apa saja hambatan atau masalah yang di alami oleh KPM selama menerima Program bantuan tersebut dan di selesaikan dengan cepat. (A.M 29 Jan 2023)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, informan lain mengatakan bahwa :

Kerjasama yang di lakukan dalam menjalankan program keluarga harapan ini sesuai dengan apa yang sudah ada di aturan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pada tingkat pusat. (E.R 29 Des 2023)

Informan lain mengatakan bahwa : Sikap dari pelaksana/ implementor terhadap kebijakan ini sudah bagus, di lihat dari ketika ada masalah atau keluhan dari KPM PKH terkait dengan bantuan yang belum cair, pelaksana atau implementor dengan baik menanggapi dan memberi sikap yang bisa menjawab keluhan dari KPM PKH tersebut. (N.S 5 Mar 2024)

Sejalan dengan pernyataan di atas informan lain mengatakan bahwa : Pelaksanaan pemberian bantuan ini sangat bergantung dari bagaimana sikap pelaksana terhadap apa saja yang akan terjadi, entah dari masyarakat ataupun dari pusat langsung, kita sebagai masyarakat sangat menghargai bagaimana pendamping desa maupun kecamatan yang telah memberikan pelayanan kepada kami dengan sangat baik. (T.P 5 Mar 2024)

Informan lain mengatakan bahwa : Setiap ada keluhan dari masyarakat pendamping PKH yang ada di Desa ini selalu berkoordinasi dengan kami di pihak pemerintah Desa, sehingga kami mengetahui apa saja masalah atau keluhan yang muncul dari KPM PKH di Desa ini, jadi kami bisa mencari dan meremukkan solusi dari masalah tersebut dan ini menunjukan bahwa sikap dari pelaksana atau implementor dari program ini memberikan sikap yang bertanggung jawab. (R. L. 5 Mar 2024)

Dari beberapa pernyataan di atas menunjukan bahwa, pada Proses Implementasi Disposisi/ sikap pelaksana sangat berdampak untuk keberlangsungan program kebijakan ini, di samping komitmen yang di jalankan sikap yang baik dari pelaksana sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari program kebijakan ini. Di lihat dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, sikap pelaksana yang di berikan oleh Implementor yakni Pendamping dan Pemerintah Desa dalam menangani atau menyikapi segala masalah atau memberikan solusi, sudah sangat membantu dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan ini.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan khususnya PKH. Selain sumber daya merupakan ujung tombak keberhasilan suatu kebijakan, Struktur Birokrasi dari kebijakan ini di buat dengan baik dan di rancang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini. Struktur dari Kebijakan ini di tetapkan dari pusat dan di jalankan oleh pihak daerah sampai pada pihak desa.

Di mulai dari Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan pendamping tiap Kelurahan/ Desa. Pada struktur ini sudah di tetapkan setiap tupoksi dari masing-masing jabatan. Di Desa Bongoime implementasi ini di bantu dengan Pendamping Desa atau sekarang di sebut dengan Pendamping PKH Desa dan di damping oleh Koordinator Kecamatan, sehingga setiap ada masalah yang terjadi 2 orang inilah yang akan menangani dan menyampaikan pada pihak Desa sampai pada Pihak Pusat.

Informasi yang di di dapatkan oleh koordinator kecamatan yaitu :

Dalam menjalankan Program kebijakan ini Sop yang di gunakan adalah Sop yang di ambil dari pusat, yaitu ada Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (R.H 29 Des 2023)

Informan lain mengatakan mengenai struktur birokrasi yaitu : Dalam penataan struktur organisasi yang di gunakan dalam program ini di mulai dari Pendamping PKH setiap desa, Koordinator Kecamatan, Koordinator Kabupaten/kota, Koordinator Provinsi, Koordinator regional dan Koordinator nasional yang berkoordinasi langsung dengan kementerian (E.R 29 Des 2023)

Sejalan dengan pernyataan di atas informan juga mengatakan bahwa : Dalam setiap pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing sudah di atur dalam SOP yang di gunakan yang berasal dari peraturan menteri yang berlaku.

Informan lain mengatakan bahwa : Struktur birokrasi yang ada memang sudah di tetapkan dari pusat, sehingga kami yang berada di Desa hanya melaksanakan dan menaati segala peraturan yang telah di buat, struktur beserta fungsi yang sudah di tetapkan akan berlaku sampai ada perubahan dari pusat maupun daerah. (S.P 5 Mar 2024)

Sejalan dengan pernyataan di atas, informan lain mengatakan bahwa : Sebagai Pemerintah Desa, hanya mengawasi dan membantu ketika ada keluhan ataupun masalah yang terjadi pada saat proses penerimaan bantuan, mengenai struktur birokrasi itu sudah di atur oleh pusat langsung. (R.L Mar 2024)

Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa, pada proses Implementasi Kebijakan PKH, Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti struktur birokrasi yang ada di Desa Bongoime mengenai Program Keluarga Harapan sudah di susun dari pihak pusat dan tinggal dijalankan oleh daerah masing-masing. Struktur birokrasi merupakan peranan yang penting dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan PKH. Dalam struktur birokrasi sudah mejabalkan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, selain itu struktur birokrasi yang jelas dapat menentukan keberhasilan dari kebijakan PKH ini.

PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini terdapat fokus dan sub fokus penelitian yakni : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango.

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango.

Suatu Program ataupun kebijakan merupakan jalan keluar yang di ambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau fenomena yang terjadi di dalam suatu Negara ataupun wilayah. Pemerintah Provinsi Gorontalo, lebih khusus Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, saat ini pemerintah Indonesia memiliki berbagai penanggulangan kemiskinan. Pada proses pelaksanaan proses suatu kebijakan tidaklah semudah itu, pastinya ada pula hambatan-hambatan yang akan di lalui oleh pelaksana baik itu dari pelaksana kebijakan ataupun anggota dari program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Keluarga PKH ini tidak lepas dari adanya faktor pendukung. Untuk penelitian ini faktor tersebut ialah, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian di temukan bahwa, proses pelaksanaan PKH di Desa Bongoime Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango telah di laksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri social tahun 2018 dan pedoman pelaksanaan Pkh tahun 2021, namun yang menjadi hambatan adalah sumber sumber daya dalam hal ini pendamping/ TRC desa hanya 1 orang saja. Hal ini dapat di atasi apabila dilakukan komunikasi dan koordinasi kerja sama dan dukungan.

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Komunikasi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008 : 150) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui adanya kesadaran untuk menerima kebijakan apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yan tepat. Komunikasi di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksnakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai Komunikasi menunjukan bahwa, Komunikasi yang terjalin antara pendamping PKH dan KPM sangat baik, dilihat daripada saat penyaluran bantuan tersebut. Namun disisi lain hal ini tidak sepenuhnya akan menjadi pendukung dalam keberhasilan kebijakan PKH. Mengapa demikian, Pendamping PKH yang dimiliki desa sebagai penyalur komunikasi hanya 1 orang ini bisa jadi menjadi hambatan keterlambatan informasi yang akan di sampaikan.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian dengan penelitian Pratiwi M (2022) bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pendamping PKH dan KPM PKH berjalan baik, hanya saja komunikasi ini terjalin hanya pada saat pertemuan kelompok, tetapi di proses yang lainnya kurang berkomunikasi dan pendamping yang ada di Desa ini hanya berjumlah 1 orang sehingga beberapa komunikasi berjalan dengan lambat.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terkait dengan Sumber Daya yang di gunakan menunjukan bahwa, Sumber daya yang terkait dengan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime yakni Pendamping PKH, Pihak Pemerintah dan KPM . Dalam hal ini semua pihak yang terkait berperan dalam Program kebijakan ini. Di mulai dari pihak pemerintah, sumber daya keuangan dan fasilitas/ sarana prasarana yang memadai.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Pratiwi M (2022) bahwa sumber daya yang di gunakan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, sebab faktor ini erat kaitannya dengan kepentingan implementor sebagai pelaksana kebijakan. Karena itu ketika sumber daya ini tidak ada maka yang terjadi sebaliknya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya terkait dengan pelaksana kebijakan PKH di Desa Bongoime sudah memadai dan masing-masingnya telah berperan penting dalam keberhasilan pelaksana PKH dan sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Disposisi/Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak

hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana). Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Memperhatikan hasil temuan penelitian ini, sikap pelaksana khususnya pendamping PKH memberikan sikap yang baik dan ramah. Selain dilihat dari itu pengamatan terkait dengan sikap pelaksana menunjukkan bahwa, proses Implementasi Kebijakan PKH merupakan elemen penting yang harus ada dalam dari pendamping PKH. Jika pendamping PKH memiliki sikap baik, bertanggung jawab dan selalu memposisikan dirinya sebagai implementor kebijakan, maka KPM PKH menilai sangat baik. Sebagaimana yang di katakana di atas bahwa para pendamping PKH selalu tegas kepada KPM PKH apabila mereka tidak mematuhi peraturan.

Keterkaitan penelitian ini dengan Pratiwi M (2022) bahwa pada sikap pelaksana dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan dimana sikap pelaksana harus mencermati hal-hal penting dan memberikan sikap baik untuk program bantuan tersebut.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa sikap (disposisi) terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping selalu berusaha memberikan sikap yang baik kepada KPM PKH dan pendamping selalu tegas kepada KPM PKH apabila tidak memenuhi aturan, maka KPM PKH pun menilai para pendamping sangat baik.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan PKH

Struktur Birokrasi adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procedures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implemmentasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (Fragmentation) atas kebijakan yang ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Dalam Proses ini Birokrasi menjadi peran yang sangat penting. Artinya semua apa yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat dan secara jelas yang menjalankan adalah birokrasi yang di bawahnya. Dalam proses keberhasilan PKH ini pemerintah Desa hanya memfasilitasi sarana penyelenggaraan sosialisasi bagi PKH. Memperhatikan hasil temuan penelitian sejauh ini birokrasi yang terkait sudah melakukan kerja sama yang baik. Di karenakan pada dasarnya PKH ini bertujuan untuk memutus tali rantai kemiskinan dan mensejahterkan masyarakat. Tingkat kerja sama dengan dukungan dari pemerintah sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan PKH ini.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian Pratiwi M (2022) bahwa pada struktur birokrasi menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan publik. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya- sumber daya menjadi efektif dan menghambat jalannya kebijakan birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas berangkat dari teori yang di pakai dan dikung oleh beberapa teori yang mengatakan bahwa dalam Impelementasi beberapa aspek seperti, Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi atau Sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap Terealisasi Impelementasi khususnya pada Kebijakan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Bongoime. Pada aspek Komunikasi hal yang diperhatikan adalah apakah dalam pemberian bantuan adanya komunikasi antara penyelenggara atau aparat pemerintah dengan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Komunikasi yang dijalankan apakah yang dijalankan 1 arah atau ada timbal balik antara penyelenggara dengan masyarakat. Kemudian pada aspek Sumber Daya, sum ber daya disini berupa, sumber daya manusia dan sumber daya yang digunakan, guna memfasilitasi Implementasi Kebijakan. Pada aspek Disposisi atau sikap pelaksana, hal yang sangat di perhatikan disini ialah bagaimana sikap dari para pelaksana terhadap apa saja yang terjadi ketika kebijakan ini di laksanakan, karena sikap dari pada pelaksana sangat berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya kebijakan tersebut. Dan terakhir struktur Birokrasi meruoakan aspek yang menjadi peta atau petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan karne pada struktur birokrasi ini di jelaskan tugas dan fungsi serta tujuan dari seluruh apa yang akan menjadi sasaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam struktur birokrasi menunjukkan, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Hal ini di hindari jangan sampai terjadi ketimpngan tugas di antara struktur birokrasi tersebut. Sesuai dengan penelitian struktur birokrasi yang terkait dalam keberhasilan pelaksana PKH di Desa Bongoime mendapat dukungan yang baik dari pemerintah Desa. Pihak pendamping dan Pemerintah Desa melakukan kerja sama yang baik guna mencapai keberhasilan dalam suatu kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas uraian dari pembahasan di atas terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dapat di simpulkan bahwa :

1. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sudah di laksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menti Sosial No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2021. Akan tetapi yang perlu di benahi dan di perhatikan yakni dalam proses penetapan sasaran KPM penerima PKH, Hal ini di karenakan dalam proses penetapan calon penerima PKH diseleksi dan di tetapkan oleh pihak pemerintah pusat sehingga mengakibatkan salah sasaran dalam penetapan calon penerima PKH.
2. Adapun hasil penelitian di lapangan mengenai subfokus terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolangodi lihat dari aspek Komunikasi, komunikasi yang terjalin antara KPM PKH dan pendamping maupun pemerintah Desa berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kekurangan yaitu komunikasi hanya terjalin pada saat pertemuan kelompok yang di adakan sebulan sekali, Pendamping yang ada di Desa ini hanya berjumlah 1 orang sehingga menyebabkan ada beberapa informasi yang lambat di dapatkan atau di peroleh oleh pendamping maupun KPM PKH.
3. Aspek Sumber Daya di Desa Bongoime mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan, banyak membantu terjalannya Program ini seperti dukungan dari pemerintah setempat, adanya aplikasi yang membantu mempercepat pengusulan nama calon KPM PKH, dan dukungan masyarakat yang membantu dengan cara menyediakan tempat/ rumah mereka sebagai tempat pertemuan kelompok yang di adakan sebulan sekali di tiap kelompok KPM PKH.
4. Aspek Diposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bongoime, sudah sangat baik dilihat dari cara mereka menerima dan menanggapi setiap keluhan dan masalah yang muncul pada saat atau pada proses pelaksanaan pemberian bantuan berlangsung.
5. Aspek Struktur Birokrasi yang ada di Desa Bongoime terhadap Imolementasi Program Keluarga Harapan, terstruktur sesuai dengan perturan yang ada, dapat di lihat dari pendamping tingkat desa, koordinator keluarahan sampai pada koordinator wilayah, yang bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Struktur ini sangat penting untuk berlangsung proses Implementasi Program PKH ini.

REFERENSI

- AG. Subarsono, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik; Teori Dan Proses, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Dua, K., & Dompau, K. (2015). Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat , Indonesia.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada
- Hamali, dan Budihastuti, (2019). Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Strategi mengelola kelangsungan hidup organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Igrisa Irawaty. 2022. Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta. Yogyakarta. 2022.
- Keban, Yermias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta. Grasindo Setiawan Guntur. 2004
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Solichin Abdul Wahab. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- University Islami, M. Irfan, 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Askara.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, Faried, dan Baharudin, (2014). Ilmu Administrasi. Makassar: PT Refika Aditama
- Alvin Alvin, & Alexandra Hukom. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2022. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 29(1), 85–96. <https://doi.org/10.59725/ema.v29i1.75>
- ANGGRENI, AYU DIAN FE UI, 2009. (2016). Bab Ii Tinjauan Pustaka - Pengertian Kemiskinan. JABE: Journal Of Accounting And Business Education, 2(3), 1–12.
- Aprillyana, N. (2019). Estimasi Indikator Kemiskinan Tingkat Kecamatan Menggunakan Regresi Kekar M-Kuantil. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 3(2), 18. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.87>
- Asdaf Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
- zProgram Studi Kebijakan Publik. (n.d.). 1–11.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2013. Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Tahun 2013. Jakarta.
- Engel. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Febrianti, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Barat Tahun 2020. In Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 2, Issue 2).
- H., Judul, J., & Mustika, C. (2011). Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008 Halaman Tulisan Jurnal (Isi / Materi Jurnal) Tesis yang paling mendasar dari Malthus adalah bahwa jumlah “ penduduk cenderung meningkat lebih cepat dari persediaan bahan . 1(4), 12–23.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. 9(02), 2496–2503.
- Kurniawati. (2017). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. In Sc.Syekhnurjati.Ac.Id. <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/munaqosah/1415203191.pdf>
- Mengukur, M., & Kebijakan, E. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. 2(3), 169–174.

- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. 24(1), 45–53.
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 4(1), 41–51.
- Simeulue, D. K. (2023). Jurnal Ekonomi , Manajemen , Bisnis dan Sosial Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. 3, 287–291.
- Syahdillah, A., & Suriyani, E. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Wirang Kecamatan Japb. <http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/740%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/740/596>
- Wahyudi, R., Fauzi, Y., & Rizal, J. (2023). Analisis Kemiskinan Ekstrem Provinsi Bengkulu menggunakan metode Geographically Weighted Regression (GWR) dengan pembobot adaptive gaussian kernel dan adaptive Bi-Square. 8(2), 134–149.
- Wati, R. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Humaniora, 2(2), 54–68.
- Wisnawa, I. G. K., & Widanta, A. A. B. P. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Wilayah Bali Timur. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 10(12), 4829–4862.